

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Akhmadi^{1*}, Syarifah Hidayah², Fitriadi³

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman^{1,2,3}
aw.akhmadi0707@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 5 Nopember 2022
Disetujui : 26 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and examine : (1) contribution and growth of types of income in local taxes, local revenues, divided local wealth management revenues, and other legitimate local revenues which are lawful to the local revenues of Kutai Kartanegara district, and (2) quadrant classification (Contribution and Growth) of each type of income in local taxes, local revenues, divided local wealth management revenues, and other legitimate local revenues which are lawful to the local revenues of Kutai Kartanegara district according to Klassen Typology. In this study, the research sources used secondary data from 2018-2021 obtained from : (1) Revenue Agency, and (2) Central Bureau of Statistic of Kutai Kartanegara district. To analyze the secondary data, the researcher used Contribution, Growth and Klassen Typology analysis tools to each type of local revenue Kutai Kartanegara district. The results of the analysis show that : (1) Based on the contribution analysis, other legitimate local revenues is the type or source of revenue with the highest contribution to the total of local revenue during 2018-2021. (2) Based on the growth analysis, local taxes is the type or source of regional revenue with the highest growth during 2018-2021. (3) Based on Klassen Typology analysis, other legitimate local revenues is the only income which is able to provide opportunities to increase the total amount of local revenues of Kutai Kartanegara district during 2018-2021.

Keywords: Contribution, Growth, Local Revenue, Klassen Typology

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Dalam fungsi alokasi kegiatan pemerintah yang bersifat pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN adalah kegiatan pemerintahan yang dikelola pemerintah pusat sedangkan APBD ialah kegiatan pemerintahan yang dikelola pemerintah daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Ada 3 (tiga) sumber penerimaan daerah yaitu : (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer, dan (c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Diantara ketiga sumber penerimaan daerah, hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber-sumber

penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap tahun pembiayaan atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu meningkat, oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan andalan dalam menunjang pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai sumber-sumber keuangan yang bisa digunakan sebagai sumber anggaran pembangunan. Ke empat sumber pungutan PAD merupakan salah satu unsur dalam menunjukkan posisi strategis dalam rangka memaksimalkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 s/d 2021

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TAHUN				RERATA
	2018	2019	2020	2021	
Pajak Daerah	60.773.205.467	75.147.461.369	110.441.517.051	114.967.277.995	90.332.365.471
Retribusi Daerah	6.392.226.211	6.445.794.373	4.106.219.051	4.008.704.812	5.238.236.112
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.045.810.871	151.207.827.427	18.244.427.512	19.768.619.228	55.816.671.260
Lain-Lain PAD Yang Sah	202.716.594.551	319.632.039.965	317.807.529.682	568.562.554.789	352.179.679.747
Jumlah PAD	303.927.837.100	552.433.123.134	450.599.693.296	707.307.156.824	503.566.952.589
Target	351.773.706.477	391.645.109.320	361.128.799.466	372.697.241.716	369.311.214.245
APBD KUKAR	4.056.073.917.135	5.745.271.078.058	4.456.587.090.185	4.443.234.734.944	4.675.291.705.081
Kontribusi (%)	13,35	10,40	9,89	6,28	9,98

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara (Data Diolah).

Berdasarkan data perkembangan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018 s/d 2021 dari BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa secara akumulasi realisasi PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 Tahun ini mengalami fluktuasi dengan rerata yakni Rp 503.566.952.589,- (Data Diolah). Realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2021 mencapai Rp 707.307.156.824,- sementara terkecil di tahun 2018 sebesar 303.927.837.100,-.

Keuangan Pemerintah daerah dapat tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya serta kemampuan pengelolaan PAD dalam manajemen organisasi sektor publik. Dalam meningkatkan penerimaan PAD, Pemda perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan PAD yang berguna bagi pelaksanaan tujuan pembangunan. Penentuan kebijakan dilakukan dengan menentukan jenis-jenis PAD yang unggulan atau potensial yang bisa dilihat dari besarnya kontribusi dan pertumbuhan jenis PAD tersebut. Pengelolaan PAD yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari PAD dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sayekti, 2016).

Pengelompokan jenis PAD yang menjadi potensial maupun unggulan tersebut menggunakan beberapa alat analisis dan salah satu alat analisis yang relatif digunakan adalah alat analisis *Tipologi Klassen*. Seperti yang digunakan oleh (Sjafrizal, 2014) untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi dari masing-masing sektor di setiap daerah. Berdasarkan uraian di atas, dan melihat kondisi yang ada serta alasan pentingnya mengetahui kontribusi dan pertumbuhan jenis PAD

Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana merupakan sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menganalisis Kontribusi dan Pertumbuhan seluruh Unsur-unsur jenis PAD dan selanjutnya akan diklasifikasikan secara kuadran dengan alat analisis *Tipologi Klasen*.

STUDI LITERATUR

Keuangan Negara

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan terutama yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlepas dari teori Keuangan Negara yang membahas tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Tan, 2014). (Suparmoko, 2012) mengemukakan bahwa Keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara disertai dengan seluruh dampaknya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawabannya. Keuangan Negara (*Public Finance*) merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja (Suparmoko, 2012).

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Riduan & Sunarto, 2012). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tepat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa, kepastian tersedianya pembiayaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil sumberdaya-sumberdaya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, dan hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparansi, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaatnya untuk masyarakat. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang baru. Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Kusuma, 2014). (Mardiasmo, 2013), perubahan uang fundamental dalam system tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintahan pusat dan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 adalah pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas serta nyata dan bertanggung-jawab kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan nyata dari kemandirian suatu daerah

dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Iqbal & Sunardika, 2018). Nuzulul (2021:3) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pengertian lain Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Abdulaziz, 2021).

Pengelolaan pajak daerah terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah yang baik tersebut menurut (Mahmudi, 2019) : Prinsip elastisitas, prinsip keadilan, prinsip kemudahan administrasi, prinsip keberterimaan politis nondistorsi terhadap perekonomian. Menurut (Putra, 2018), retribusi daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah dengan dipaksakan yang bisa mendapat imbal balik secara langsung. Sedangkan menurut (Sudaryo, 2017) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Rondonuwu, 2015).

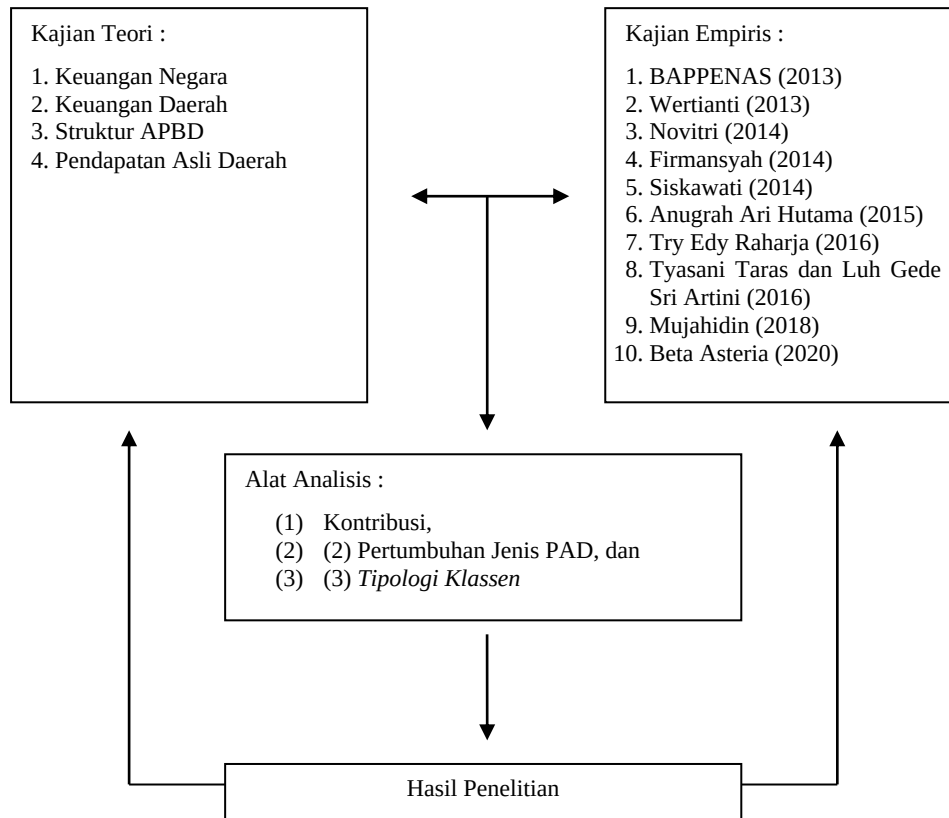
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerja jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realita sentitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Halim & Kusufi, 2014).

Kerangka Pikir Penelitian

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan teori-teori sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian ini dapat disusun menjadi alur pikir dalam penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kesanggupan yang dimiliki. Bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki kontribusi dan pertumbuhan masing-masing yang dapat mempengaruhi realisasi PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari dasar pemikiran tersebut, terlihat bahwa menganalisa kontribusi dan pertumbuhan 4 (empat) komponen jenis PAD Kabupaten Kutai Kartanegara penting dilakukan, mengingat potensi setiap komponen dari PAD berbeda yang disebabkan oleh beragam unsur. Kemampuan menganalisis sejauh mana kontribusi dan pertumbuhan jenis PAD dan memanfaatkannya secara

optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaannya. Adapun kerangka pikir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Rencana Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif Deskriptif dan pangkal penelitian memakai data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian Kuantitatif Deskriptif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode *positivistik* karena berlandaskan pada filsafat positivisme selain itu juga sebagai penelitian ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah. Selama menganalisis data sekunder tersebut, digunakan alat analisis Kontribusi dan Pertumbuhan dari seluruh jenis Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan dari PAD, dengan begitu selanjutnya mengklasifikasikan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan ke dalam suatu kuadran dengan teknik *Tipologi Klassen*.

Jangkauan Penelitian

Pengumpulan data dimulai dengan melakukan pendataan yang berasal dari Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang Sah, serta wilayah yang diteliti yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terpusat pada Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam, yakni dengan menggunakan penulisan deskriptif dan data yang digunakan merupakan data kuantitatif.

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian Kuantitatif Deskriptif. Metode penelitian kuantitatif memiliki sifat objektif, peneliti merupakan objek Independen, bebas nilai, tidak bias, dan memiliki pendekatan deduktif (Sugiyono, 2016).

Kemudian metode deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pola pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2016).

HASIL

1. **Kontribusi Seluruh Unsur dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Berdasarkan hasil analisis kontribusi, didapat jenis penerimaan PAD sebagai Kontribusi Tertinggi tahun 2018 adalah Lain-Lain PAD yang Sah dengan nilai 66,7% dengan kontribusi terbesar diperoleh Pendapatan BLUD mencapai 51,4%, sementara kontribusi terendah adalah Retribusi Daerah sebesar 0,02% dengan kontribusi terendah diperoleh Retribusi Izin Gangguan hanya senilai 0,000005% namun masih lebih baik dibanding Penjualan Produk Usaha Daerah yang tidak berkontribusi sejak tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, masing-masing jenis PAD mengalami peningkatan walau begitu Lain-Lain PAD yang Sah tetap memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai 57,86% dan Pendapatan BLUD kembali berkontribusi besar mencapai 47,67%, dan Retribusi Daerah kembali sebagai kontributor terkecil hanya mampu mendapatkan 0,12% dan beberapa jenis retribusi tidak berkontribusi seperti Penjualan Produk Usaha Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Ditahun 2020 Lain-Lain PAD yang Sah tetap sebagai penyumbang tertinggi sebesar 70,53% dan Pendapatan BLUD juga kembali memperoleh hasil tertinggi yaitu 56,43%, sedangkan terendah juga kembali diperoleh Retribusi Daerah 0,09% dengan beberapa jenis retribusi yang tidak berkontribusi yaitu Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, dan Retribusi Izin Gangguan. Ditahun 2021, Lain-Lain PAD yang Sah kembali sebagai yang tertinggi dengan nilai yang semakin baik yakni 80,38% (terjadi kenaikan) dan Pendapatan BLUD kembali sebagai penyumbang terbesar mencapai 71,16%, kontribusi terendah masih ditempati Retribusi Daerah dengan nilai yang terus menurun yakni 2,79% dan beberapa retribusi kembali tidak berkontribusi seperti Retribusi Pasar/Pertokoan & Retribusi Izin Gangguan.

Bila dikaji secara empirik sesuai data dan kondisi riil yang terjadi di lapangan, pencapaian Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total PAD selama 4 tahun ini, walaupun terjadi sedikit penurunan ditahun 2019. Namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 pencapaian selalu melebihi nilai target Pemerintah yang ada di APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Hal ini tidak terlepas dari beberapa sumber penerimaannya yang secara garis besar selama 4 tahun meningkat, serta memiliki peranan atau andil yang cukup besar, seperti realisasi : (a) Pendapatan Dana Kapitasi JKN, (b) Penerimaan Jasa Giro, (c) Pendapatan dari Pengembalian, dan (d) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Sejalan dengan pernyataan Bahari Joko Susilo selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga disampaikan dalam media KUTAIRAYA.com (25/01/22), disimpulkan jika kenaikan terbesar PAD Kutai Kartanegara diperoleh dari Lain-Lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit melalui anggaran Pemerintah Pusat. Kemudian Pajak Daerah dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PAD dalam 4 tahun ini tidak terlepas dari besar sumber penerimaannya selama tahun 2018 s.d 2021 terus meningkat signifikan, serta memiliki andil yang cukup besar, yakni (a) Pajak Restoran, (b) Pajak Penerangan Jalan, serta (c) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sesuai pernyataan Bahari Joko Susilo selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga disampaikan dalam media KUTAIRAYA.com (25/01/22), kenaikan pendapatan Pajak Daerah dalam dua tahun terakhir tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah melakukan perbaikan mulai dari sistem pungutan, pembayaran, inovasi, sosialisasi, edukasi maupun pengawasannya. Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi tertinggi ketiga terhadap total PAD selama 4 tahun ini, tidak terlepas dari sumber penerimaannya secara garis besar selama tahun 2018 s.d 2021 mengalami fluktuasi penurunan cukup besar jika dilihat perbandingan pendapatan tahun 2019 dengan tahun 2020, namun tetap memiliki andil yang cukup terhadap total PAD, seperti Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah (BUMD).

Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 tahun ini mempunyai kontribusi paling kecil terhadap total PAD, namun walaupun demikian hal ini tidak terlepas dari beberapa sumber penerimaannya yang secara garis besar selama tahun 2018 s.d 2021 perlahan meningkat yang tentu memiliki andil yang cukup besar, yakni seperti realisasi : (a) Pelayanan Pasar, (b) Pengujian Kendaraan Bermotor (c) Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta (d) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

2. Pertumbuhan Seluruh Unsur dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan, didapat jenis penerimaan PAD dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2018 adalah Retribusi Daerah mencapai 28,09%, Pelayanan Persampahan sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 19,77% dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebagai penyumbang pertumbuhan terendah yakni -1,77% dengan Penerimaan dari PT Taspen mendapat nilai (-0,27%). Kemudian pada tahun 2019 Retribusi Daerah kembali menghasilkan pertumbuhan tertinggi mencapai 252,53% dengan penerimaan Retribusi Izin Gangguan mencapai 259,15% dan pertumbuhan terendahnya diperoleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan senilai 3,44% dari Bagian Laba Atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Selanjutnya pada tahun 2020 Lain-Lain PAD yang Sah mendapat nilai pertumbuhan terbesar dalam beberapa tahun ini sebesar 569,70% dengan penyumbang terbesarnya dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai 148,75% setelah itu Penerimaan Jasa Giro 95,03% dan pertumbuhan terendah diperoleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai -0,88% dengan Bagian Laba Atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yang memperoleh 0% yang sejak tahun 2017 belum ada laporan penerimaan pendapatannya. Ditahun 2021 hasil analisis menunjukkan jika Retribusi Daerah memperoleh pertumbuhan tertinggi dengan nilai 1,82% dengan pendapatan tertinggi dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta & Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dengan nilai tidak terhingga yang disimbolkan (∞) karena berhasil menerima pendapatan setelah sebelumnya tidak memiliki penerimaan, dan pendapatan terendah diperoleh sumber pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dengan nilai -0,98%.

Bila dikaji secara empirik sesuai data dan kondisi riil yang terjadi, pencapaian Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pertumbuhan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, walaupun *trend*-nya sempat menurun di tahun 2020. Setelah itu Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pertumbuhan tertinggi kedua jika dilihat selama 4 tahun ini, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 walaupun tahun setelahnya melandai namun tidak pernah mendapat nilai negatif.

Selanjutnya Lain-Lain PAD Yang Sah menjadi pertumbuhan tinggi ketiga. Sedangkan pertumbuhan terendah dari unsur PAD ditempati Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah, mendapat hasil negatif di tahun 2018 dan 2020, kecuali tahun 2019 dan 2020 itupun hanya mendapat nilai 3,44% dan 0,08% beserta fluktuasi yang dialami.

3. Tipologi Klassen (Klasifikasi Kuadran) Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan Unsur Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil analisis *Tipologi Klassen* yang menghasilkan 16 (enam belas) klasifikasi kuadran, yang masing-masing mempunyai karakteristik atau perbandingan kontribusi dengan pertumbuhan jenis-jenis PAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbeda. Maka, jika dilihat dari 2 karakteristik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 16 kuadran dalam 4 tahun ini.

a. Pajak Daerah

Pada tahun 2018, tidak ada satu unsur penerimaan Pajak Daerah yang berada di Kuadran I (*fast growing*). Pajak Sarang Burung Walet menempati Kuadran II (*potential*). Kuadran III (*developing*) ditempati Pajak Restoran & Pajak Penerangan Jalan. Lalu Kuadran IV (*depressed*) ditempati Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tahun 2019, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi satu-satunya pendapatan Pajak Daerah yang berada di Kuadran I (*fast growing*), Pada Kuadran II (*potential*) ditempati oleh Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Restoran dan Pajak Penerangan berada di Kuadran III (*developing*), lalu sisanya yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan berada di Kuadran IV (*depressed*).

b. Retribusi Daerah

Pada Tahun 2018, tidak ada satupun unsur sumber penerimaan PAD pada Kuadran I (*fast growing*), Kuadran II (*potential*) diisi oleh Retribusi Pelayanan Persampahan, Pelayanan Tera-Tera Ulang, Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah, Pada Kuadran III (*developing*) ada Retribusi Pasar/Pertokoan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kuadran IV (*depressed*) ditempati oleh Pelayanan Parkir Ditepi Jalan, Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Pelayanan Pasar, Retribusi Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Terminal, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Izin Gangguan serta Perpanjangan IMTA. Tahun 2019 masih belum ada penerimaan yang masuk kategori Kuadran I (*fast growing*), Kuadran II (*potential*) diisi oleh Retribusi Izin Gangguan. Pada Kuadran III (*developing*) ada Retribusi Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Tempat Rekreasi & Olahraga, dan Ijin Mendirikan Bangunan. Kuadran IV

(*depressed*) ditempati oleh Pelayanan Persampahan, Pelayanan Parkir Ditepi Jalan, Biaya Cetak Peta, Penyediaan & Penyedotan Kakus, Pelayanan Tera-Tera Ulang, Pemakaian Kekayaan Daerah, Penjualan Produk Usaha Daerah, Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhan serta Pelayanan Terminal & Perpanjangan IMTA.

Tahun 2020 sesuai prediksi tahun sebelumnya jika Pendapatan Pelayanan Pasar menempati Kuadran I (*fast growing*) justru yang tidak disangka Perpanjangan IMTA melesat ke Kuadran I. Kuadran II (*potential*) diisi oleh Pelayanan Persampahan, Penyediaan & Penyedotan Kakus, Pelayanan Tera-Tera Ulang. Kuadran III (*developing*) ditempati oleh Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tempat Rekreasi dan Olahraga & Ijin Mendirikan Bangunan. Kuadran IV (*depressed*) ditempati oleh Pelayanan Parkir Ditepi Jalan, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Khusus Parkir, Pelayanan Kepelabuhan, Penggantian Biaya Cetak Peta, , Terminal, Rumah Potong Hewan serta Penjualan Produk Usaha Daerah. Di tahun 2021 Kuadran I (*fast growing*) diisi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan serta Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kuadran II (*potential*) diisi oleh Retribusi Terminal, Pelayanan Persampahan, Biaya Cetak Peta, Penyediaan & Penyedotan Kakus, Pel Tera-Tera Ulang, Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Penjualan Produk Usaha Daerah. Kuadran III (*developing*) diisi Retribusi Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tempat Rekreasi dan Olahraga, Perpanjangan IMTA yang berada. Kuadran IV (*depressed*) diisi Pelayanan Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan serta Retribusi Izin Gangguan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2018, tidak ada satupun pendapatan yang berada di Kuadran I (*fast growing*) dan Kuadran II (*potential*), Kuadran III (*developing*) ditempati Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD dan Kuadran IV (*depressed*) ditempati Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta.

Pada tahun 2021, tidak ada satupun pendapatan yang berada di dan Kuadran II (*potential*), Kuadran III (*developing*) dan Kuadran IV (*depressed*). Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta berada di Kuadran I (*fast growing*) disebabkan adanya penerimaan di bidang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta yang sebelumnya belum pernah ada penerimaan dan ini menunjukkan salah satu kinerja yang baik dari Pemerintah Kutai Kartanegara karena adanya peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah khususnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Pada tahun 2018, Kuadran I (*fast growing*) tidak ditempati satupun penerimaan, sedangkan Kuadran II (*potential*) ditempati Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Pendapatan dari Pengembalian. Kuadran III (*developing*) diisi oleh Pendapatan BLUD, berbeda dengan Kuadran IV (*depressed*) yang diisi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Denda atas Keterlambatan Pekerjaan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan, Lain-Lain PAD Sah Lainnya, Hasil Pemanfaatan Kekayaan

Daerah serta Hasil dari Penerimaan PT Taspen. Di tahun 2019, Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan BLUD naik di Kuadran I (*fast growing*). Kuadran II (*potential*) ditempati oleh Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan * Penerimaan Jasa Giro. Sedangkan tidak ada satupun pendapatan berada di Kuadran III (*developing*). Kuadran IV (*depressed*) dihuni oleh Denda atas Keterlambatan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan, Lain-Lain PAD Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN & Penerimaan dari PT Taspen.

Secara seksama, dapat dicermati selama tahun 2018 s.d 2021 adanya perbedaan posisi Kuadran berdasarkan temuan analisa yang ada. Namun, yang sering dijumpai adalah hampir hampir tidak ada unsur maupun sumber penerimaan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berposisi di Kuadran I, jikapun ada hanya beberapa sumber atau unsur penerimaan saja yang berada di Kuadran I (*fast growing*). Yang menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini bergantung dari kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah yang pertumbuhannya tidak stabil setiap tahunnya. Kemudian penulis menguraikan secara rinci sebagaimana Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 :

Tabel 2. Hasil Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Sumber Pajak Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021

NO.	URAIAN PAJAK DAERAH	KUADRAN			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Hotel	IV	IV	IV	IV
2.	Pajak Restoran	III	III	III	III
3.	Pajak Hiburan	IV	IV	IV	IV
4.	Pajak Reklame	IV	IV	IV	II
5.	Pajak Penerangan Jalan	III	III	I	III
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	IV	II	IV	IV
7.	Pajak Parkir	IV	IV	IV	IV
8.	Pajak Air Tanah	IV	II	IV	II
9.	Pajak Sarang Burung Walet	II	IV	II	II
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan/Perkotaan	IV	IV	II	II
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	IV	I	I	I

Sumber : Lampiran (Data Diolah)

Tabel 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Sumber Retribusi Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021

NO.	URAIAN RETRIBUAI DAERAH	KUADRAN			
		2018	2019	2020	2021
Retribusi Umum					
1.	Pelayanan Persampahan	II	IV	II	II
2.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	IV	IV	IV	IV
3.	Pelayanan Pasar	IV	III	I	III
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	III	III	III	III
5.	Penggantian Biaya Cetak Peta	IV	IV	IV	II
6.	Penyediaan atau Penyedotan Kakus	IV	IV	II	II

7.	Pelayanan Tera-Tera Ulang	II	IV	II	II
Retribusi Usaha					
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	II	IV	IV	II
9.	Pelayanan Terminal	IV	IV	IV	II
10.	Tempat Khusus Parkir	IV	IV	IV	IV
11.	Rumah Potong Hewan	IV	IV	IV	IV
12.	Pelayanan Kepelabuhan	IV	IV	IV	I
13.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	IV	IV	III	III
14.	Penjualan Produk Usaha Daerah	IV	IV	IV	II
15.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	III	IV	IV	IV
Retribusi Tertentu					
16.	Ijin Mendirikan Bangunan	III	III	III	I
17.	Perpanjangan Ijin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA)	IV	IV	I	III
18.	Retribusi Izin Gangguan	IV	II	IV	IV

Sumber : Lampiran (Data Diolah)

Tabel 4. Hasil Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021

NO.	URAIAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	KUADRAN			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	III	I	III	I
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Sawasta	IV	IV	IV	I

Sumber : Lampiran (Data Diolah).

Tabel 5. Hasil Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Sumber Lain-Lain PAD Yang Sah Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 s.d 2021

NO.	URAIAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KUADRAN			
		2018	2019	2020	2021
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipishkan	IV	II	II	II
2.	Penerimaan Jasa Giro	II	II	II	II
3.	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	IV	IV	IV	II
4.	Pendapatan Denda Pajak	II	IV	IV	II
5.	Pendapatan Dari Pengembalian	II	IV	IV	II
6.	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	IV	IV	IV	II
7.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	IV	I	IV	II
8.	Pendapatan BLUD	III	I	III	I
9.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	IV	IV	IV	IV
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	II	IV	IV	IV
11.	Penerimaan dari PT Taspen	IV	IV	IV	IV

Sumber : Lampiran (Data Diolah)

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sampai saat ini Lain-Lain PAD yang Sah yang mampu berkontribusi maksimal bagi penerimaan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dibandingkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Besarnya kontribusi dari Lain-Lain PAD Yang Sah disumbang dari Jenis Penerimaan : (a) Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah, (b) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, (c) Pendapatan Dana Kapitasi JKN, (d) Penerimaan Jasa Giro, (e) Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya, dan (f) Pendapatan Pengembalian.

Kemudian kontribusi Pajak Daerah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pajak Daerah disumbang dari jenis pendapatan : (a) Pajak Restoran, (b) Pajak Penerangan Jalan, (c) Bea Perolehan Bea atas Hak Tanah dan Bangunan, (d) Pajak Hotel, (e) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan (f) Pajak Reklame. Selanjutnya Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hanya selisih rerata 7,3% dari yang di atasnya (Pajak Daerah) disumbang terbesar dari jenis pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Kaltimara (BUMD) dalam 4 tahun ini.

Sementara tingginya pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengelola potensi yang ada dan mencapai target sesuai penelitian perencanaan yang dilakukan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun berfluktuasi dan kontribusinya kecil terhadap PAD. Menelaah pengamatan yang dilakukan penulis, hingga saat ini masih terdapat jenis pajak dan retribusi yang belum dikelola secara maksimal dengan beberapa faktor penyebab, yaitu :

1. Pajak Hotel, terdapat beberapa permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan *self assesment* dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar, selain itu dari sisi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan penyesuaian tarif hotel bagi wajib pajak hotel yang penetapan pajaknya berdasarkan *official assesment* dikarenakan belum melaksanakan pencatatan dan pembukuan.
2. Pajak Restoran, terdapat beberapa permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan *self assesment* dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar, selain itu dari sisi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan penyesuaian tarif pajak restoran bagi wajib pajak restoran yang penetapan pajaknya berdasarkan *official assesment* dikarenakan belum melaksanakan pencatatan dan pembukuan. Kemudian oleh BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan wajib pajak catering yang tidak melaporkan kegiatan jasa katering dengan perusahaan-perusahaan pertambangan.
3. Pajak Hiburan, terdapat permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib yang penetapan pajaknya berdasarkan *self assesment* dalam melaporkan data pendapatan hotel setiap bulan secara jujur dan benar.
4. Pajak Reklame, terdapat permasalahan yaitu maraknya pemasangan reklame rokok dan lain-lain oleh perusahaan rokok di tempat-tempat masyarakat seperti warung, kios dan toko tanpa melaporkannya kepada BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), terdapat permasalahan yaitu tidak adanya data penggunaan listrik yang diperoleh dari sumber lain selain dari PT. PLN sehingga BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melakukan pemantauan atas PPJU yang sebenarnya harus dipungut, selain itu belum terdatanya pengguna PPJU non PLN di sektor Kehutanan dan Perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan faktor teknis yakni belum adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara yang mengatur mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet padahal potensi pendapatan yang bisa didapatkan sangat besar seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam media KALTIMPOST (06/09/22) menyatakan “KPK masih menemukan potensi terjadinya kerugian keuangan daerah khususnya sektor penerimaan asli daerah dari Pajak Sarang Brung Walet senilai Rp564 Milliar”.
7. Pajak Air Bawah Tanah ternyata hingga saat ini BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara belum pernah melakukan pendataan terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah.
8. Selain jenis pajak diatas, masih terdapat jenis pajak lainnya yaitu PBBP2 dan BPHTB yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum mampu berkontribusi maksimal terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Retribusi Jasa Umum, terdapat beberapa permasalahan seperti Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan hasil evaluasi dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan pedagang dan juga perekonomian yang mengalami penurunan membuat daya beli masyarakat berkurang.
10. Retribusi Jasa Usaha, terdapat beberapa permasalahan yaitu belum optimalnya seperti Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang berhenti mendapat penerimaan sejak tahun 2019 sedangkan di tahun sebelumnya Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan menghasilkan Rp 5.441.600,- di tahun 2017 dan Rp 2.007.000,- di tahun 2018. Pengelolaan pemakaian kekayaan daerah oleh pihak lain (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), pengelolaan kepelabuhanan dan Retribusi Produk Usaha Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Kontribusi, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis atau sumber penerimaan dengan kontribusi tertinggi terhadap total Pendapatan Asli Daerah selama 2018-2021. Berdasarkan Analisis Pertumbuhan, Retribusi Daerah merupakan jenis atau sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2018-2021. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen, hanya Lain-Lain PAD yang mampu memberikan peluang terhadap peningkatan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018-2021.

REFERENSI

- Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Bale Bandung*, 9(1).
- Kusuma, H. (2014). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Riduan, & Sunarto. (2012). *Keuangan Negara Dasar*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jakarta.
- Rondonuwu, R. H. (2015). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. 3(4).*
- Sayekti, N. W. (2016). *Kebijakan Pembangunan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tangerang*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Cetakan Pertama*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko. (2012). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Keenam, Cetakan Kedua*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tan, S. (2014). *Perencanaan Pembangunan*. PT. Media Express, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.